Barika et al. *Jurnal Ekonomi-Qu Vol 13 No. 1 (2023)*
http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v13i.20532

Research Article

Determinan Kemiskinan di Sumatera

Barika, Barika[1*], Retno Agustina Ekaputri[1] Bambang A Hermanto[1]
[1]Universitas Bengkulu
***Correspondence author: barika@unib.ac.id**

Abstract: The purpose of this study is To analyze the effect of economic growth. capital expenditure, education and investment on poverty in Sumatra. This study uses poverty data, economic growth data, government spending data, gross fixed investment ratio data in Sumatra in 2011-2020. Influence testing between variables will be carried out using the panel data regression analysis method. The R2 value of 0.55 which means that the variables of economic growth, education, unemployment and investment are able to explain the variable poverty rate of 55%. The poverty variable is a bound variable that is influenced by economic growth, education, unemployment and investment. From the results of data processing, it was found that all variables had a significant effect on poverty in Sumatra

Keywords: Poverty ; economic growth; Investment, Government Spending

1. Introduction

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan siding pada tahun 2015. Dari hasil sidang tersebut disepakati untuk melanjutkan skema MDGs menjadi SDGs, yang mempunyai tujuan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan, mencapai kesetaraan hingga menangani perubahan iklim ditahun 2030. SDGs juga mempunyai 17 tujuan dan 169 sasaran. Perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan penerapan MDGs telah banyak dilakukan baik secara global maupun nasional diantaranya adalah (Asadullah and Savoia 2018). Penghahapusan kemiskinan (no poverty) dan Pengurangan ketimpangan (reducing inequality) tetap menjadi prioritas dalam program SDGs.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi perhatian di beberapa Negara diantaranya (Freistein and Mahlert 2016) dan (Roy et al. 2018) dan (Breunig and Majeed 2020). Di Indonesia pada periode 2010 – 2020 tingkat kemiskinannya menunjukkan trend yang fluktuatif. Persentase rata-rata penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia tahun 2012 yakni sebesar 11,66 persen dan menurun sampai tahun 2019. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sehingga rata-rata penduduk Indonesia yang hidup miskin di atas 10%. Bahkan disejumlah wilayah masih memiliki penduduk miskin yang persentasenya diatas rata-rata nasional. Seperti wilayah Papua-Maluku, ditahun 2010 memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, yakni sebesar 24,45% dan ditahun 2020 sebesar 18,36%. Sementara Pulau Kalimantan memiliki nilai persentase penduduk miskin terendah ditahun 2010 yakni sebesar 7,57% dan 6,27% pada tahun 2020.

Untuk melihat keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan memperhitungkan besarnya pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh setiap daerah. Karena tumbuhnya perkonomian suatu daerah menjadi indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di daerah tersebut. Pada grafik 1 diketahui bahwa pada tahun 2011 wilayah pulau Sulawesi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni 8,87% dan terendah adalah daerah Bali-Nusa Tenggara yakni 2,81%, meskipun demikian pada tahun 2019 wilayah ini memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi positif menjadi sebesar 4,92%.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh perekonomian, berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi demikian pula dengan Provinsi-Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021 pemerintah secara nasional melakukan upaya perbaikan ekonomi. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi wilayah Papua –Maluku tumbuh menjadi 8,51%. Terendah Bali –Nusa Tenggara 0,78%.

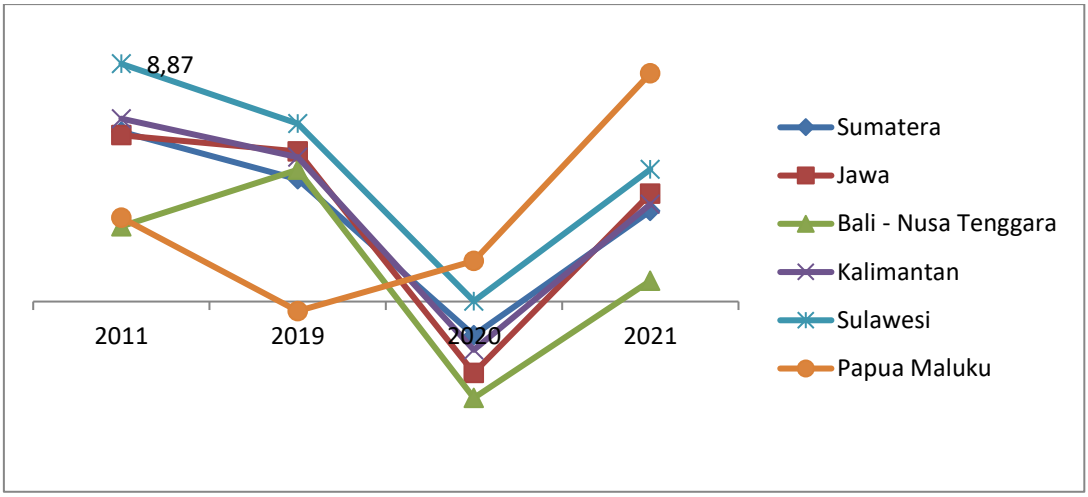

Grafik 1 Pertumbuhan ekonomi di enam wilayah/pulau di Indonesia tahun 2011, 2019 – 2021.
Sumber : Pengolahan data Sekunder 2022.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Lamba, Allo, and Lamba 2019) mengemukakan Jumlah penduduk dan desentralisasi fiscal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. (Leal Filho et al. 2021) yang menyatakan kemiskinan merupakan hambatan utara dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan terdapat beberapa faktor yang menentukan salah satunya melalui peningkatan pedidikan (Faisala et al. 2020), (Hofmarcher 2021). Pengeluaran pemerintah terutama untuk program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, akan tetapi hasil penelitian (Ali and Ali 2018) memperlihatkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak mempengaruhi besarnya persentase kemiskinan, sebaliknya dengan tingkat pengangguran. Seperti halnya dengan hasil penelitian (Pratama and Utama 2019) yang menyatakan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali.

Sejumlah Provinsi mempunyai tingkat pertumbuhan yang bagus atau tinggi dan persentase jumlah penduduk miskin yang rendah, seperti Provinsi Jambi, Kep.Bangka Belitung, dan Kep.Riau. Akan tetapi banyak juga Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun tingkat kemiskinan juga tinggi, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Oleh karena itu diperlukan kajian tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan wilayah di Sumatera. Melihat pada uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka pertanyaan dalam studi ini Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Pendidikan, dan pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan?

2. Literature Review

2.1 Kemiskinan

Rudolf S. Sinaga dan Benyamin White dalam (Musahadi et al. 2015) membagi kemiskinan sebanyak dua bagian. Pertama, kemiskinan alamiah yaitu yang tercipta akibat dampak minimalisasi sumber daya yang dimiliki. Selain itu dapat pula terjadi karena penggunaan mesin dan terknologi yang kurang berkembang atau rendah teknologi. Selanjutnya miskin buatan, yang berarti hidup miskin yang diakibatkan ada berbagai kelembagaan membuat anggota atau kelompok masyarakat yang tidak memahami sarana ekonomi dan setiap fasilitas secara merata.

Kemudian menurut (Kuncoro 2010) menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mencukupi standar hidup minimum merupakan pengertian dari kemiskinan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau daerah yang tidak mampu mengembangkan kehidupan yang lebih layak atau dapat diartikan tidak mampu mengoptimalkan standar hidup yang lebih baik.

Sementara menurut Sharp dalam (Kuncoro 2010) penyebab kemiskinan jika dilihat dari sisi ekonomi terbagi menjadi tigas aspek. Pertama, kemunculan kemiskinan dikarenakan adanya perbedaan motif kepemilikan sumberdaya yang memicu distribusi pendapatan yang senjang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumberdaya yang kualitasnya rendah dan terbatas. Kedua, kemunculan kemiskinan diakibatkan adanya ketidaksamaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia mengartikan bahwa produktifitasnya rendah, giliran upahnya rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah ini akibat rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemunculan kemiskinan disebabkan adanya ketidaksamaan akses dalam modal.

Status kemiskinan ditentukan dengan membandingkan pendapatan tahunan suatu nilai pendapatan yang disebut ambang kemiskinan, ambang batas kemiskinan bervariasi menurut ukuran keluarga, jumlah anak, dan usia rumah tangga. Jika pendapatan uang sebelum pajak keluarga kurang dari nilai dolar dari ambang batas mereka, maka keluarga itu dan setiap individu di dalamnya dianggap miskin. Untuk orang yang tidak berkeluarga, status kemiskinan ditentukan dengan membandingkan pendapatan individu dengan ambang kemiskinannya (Bishaw, Alemayehu; Glassman 2016).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian dari sub-bidang ekonomi yang paling relevan dan menarik. Pada umumnya, pembangunan ekonomi tetap menjadi perkara utama bagi umat manusia dan ekonomi sebagai ilmunya. Pada saat Adam Smith menempatkan banyak fondasi ekonomi modern, yang memungkinkan ada perbedaan kecil diantara negara-negara terkaya dan termiskin di dunia (Acemoglu 2012).

Teori pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menunjukkan sifat variabel non-ekonomi yang pada akhirnya menentukan pertumbuhan tingkat produksi umum suatu perekonomian, yang menyebabkan beberapa Negara tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lain. Secara umum faktor-faktor penting yang menentukan tingkat tren pertumbuhan dapat dilihat dalam seberapa besar kecenderungan masyarakat untuk menabung (yang menentukan tingkat akumulasi modal), serta aliran penemuan atau inovasi (yang menentukan tingkat pertumbuhan) (Kaldor 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikkan kemampuan suatu negara pada jangka waktu yang panjang. Kemampuan tersebut dinilai dari banyaknya barang-barang yang mampu disediakan. Kemampuan tersebut berkembang sebanding dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan (Jhingan 2007).

(Michael P Todaro ;Stephen C Smith 1997) mengemukakan bahwa suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain melingkup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan meruapakan suatu proses pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menyangkut dengan konsep alur pengembangan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari Gross Domestic Product (GDP) riil, tanpa melihat kenaikan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk, atau apakah terdapat perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi bisa saja tanpa terjadinya pembangunan, misalnya pada zaman penjajahan; ada investasi pada berbagai bidang (perkebunan, pertambangan , dan lain- lain) dan meningkatkan produksi, tapi hasilnya sebagian besar dinikmati oleh penjajah.

2.3 Studi Terdahulu

Makalah (Kogid et al. 2010) mengkaji beberapa faktor yang mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. variabel-variabel diteliti adalah pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, nilai tukar, serta penanaman modal asing langsung di Malaysia dari tahun 1970 hingga 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat *long term cointegration* dan beberapa kausaltas jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor determinannya. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa semua faktor penentu (*combined determinan factors*) menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, pengujian individual menunjukkan bahwa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya pengeluaran konsumsi dan ekspor, sementara pengeluaran pemerintah tidak demikian. Nilai tukar dan investasi asing langsung. Studi menyimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi dan ekspor memainkan peran penting sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, nilai tukar dan investasi asing langsung mungkin memiliki peran sebagai katalis dan melengkapi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

Penelitian (Putro, Mintarti, and Wijaya 2018) bertujuan untuk menganalisa beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil analisis, variabel Belanja modal pemerintah, IPM, dan Ketimpangan pendapatan/ gini ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel antara PDRB.

Hasil penenlitian (Febriani and Yusnida 2020) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Variabel-variabel ini dihubungkan dengan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu, dan pendapatan ketimpangan terbukti merupakan variabel intervening yang mempengaruhi kesejahteraan.

3. Methods

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kuantitatif. (Nazir 2005) menyatakan pengertian dari metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang . Menurut (Sugiyono 2011) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti data yang tidak dihimpun secara langsung, namun diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004). Data yang akan dikumpulkan meliputi data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, Gini ratio dan persentase penduduk miskin di Sumatera. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), data diakses melalui internet dengan situs www.bps.go.id dan djp.kemenkeu.go.id .

Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) Provinsi-Provinsi di Sumatera dan data *time series* (runtun waktu) tahun 2011-2020.

Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel (Sugiyono, 2013). Adapun persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan (Y)} = \beta_0 + \beta_1\text{Growth} + \beta_2\text{Pendidikan} + \beta_3\text{Pengangguran} + \beta_4\text{Investasi} + \varepsilon$$

4. Results and Discussion

4.1 Hasil

Penelitian ini dilakukan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Pada tahun 2011-2020, pertumbuhan ekonomi di Sumatera mengalami fluktuasi hingga tahun 2019. Pada tahun 2011 Provinsi Jambi tercatat sebagai daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,86%. Sementara Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi aceh yaitu sebesar 3,28%. Namun ditahun tahun 2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi disetiap Provinsi mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera tahun 2011-2020

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37
Sumatera Utara	6,85	6,83	6,07	5,48	5,13	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
Sumatera Barat	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,44
Riau	6,34	6,31	6,08	5,88	5,53	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,62
Jambi	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
Bengkulu	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
Lampung	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13
Kep.Bangka Belitung	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,3
Kep. Riau	6,96	7,63	7,21	6,6	6,02	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8

Sumber : BPS, 2022.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera adalah sebesar 4,35%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011 yakni 6,33%. Terdapat dua Provinsi yakni Aceh dan Riau yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata Sumatera. Sedangkan Provinsi lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata Sumatera. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera terjadi hingga tahun 2015. Hal ini diduga karena adanya krisis yang menjadi penyebabnya.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan dan fluktuatif hingga tahun 2019. Karena pada tahun 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,56%. Provinsi Aceh, Riau, jambi dan Kepualauan Bangka Belitung mempunyai pertumbuhan dibawah rata-rata Sumatera. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar 5,69%.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi setiap Provinsi, diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,61% dan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 sebesar -0,37%. Di Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 6,66% dan pertumbuhan ekonomi terendah pada terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar -1,07%. Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 6,34% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar -1,62%. Di Provinsi Riau pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 5,57% dan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,13%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tertinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 7,86% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar -0,44%. Adapun di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi ditahun 2012 yaitu sebesar 6,83% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 sebesar -0,11%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi disemua Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Riau (-3,8%). Selanjutnya adalah Provinsi kepualauan Bangka Belitung (-2.3%) dan Provinsi Lampung(-1,67%). Adapun Provinsi yang mengalami kontaksi terendah adalah Provinsi Bengkulu (0,02%), Provinsi Aceh (-0,37%) dan Provinsi Jambi (-0,44%).

Tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera periode tahun 2011-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dari sebesar 11,52% menjadi 9,44% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin rata-rata mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,82%. Provinsi dengan rata-rata persentase kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Aceh (16,83%) dan selanjutnya adalah Provinsi Bengkulu (16,51%). Persentase wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yakni sebesar 5,01 %.

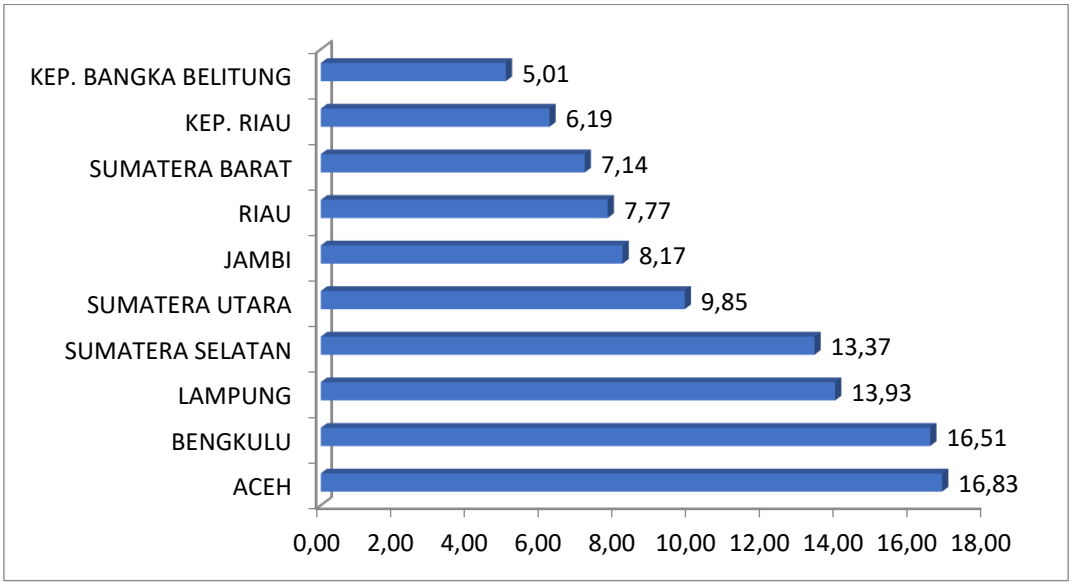

Gambar 2. Rata-rata persentase penduduk miskin per Provinsi di Sumatera
Sumber : Pengolahan data sekunder 2022.

Dari grafik diatas, terdapat empat Provinsi yang tercatat persentase jumlah penduduk miskinnya diatas rata-rata Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Pada tahun 2013-2016 menunjukan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu pada tahun 2013 sebesar 17,75%, tahun 2014 sebesar 17,09%, tahun 2015 sebesar 17,16% dan tahun 2016 sebesar 17,03%. Sedangkan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera yaitu Provinsi kepulauan Bangka Belitung yakni pada tahun 2013 sebesar 5,25%, tahun 2014 sebesar 4,97%,

tahun 2015 sebesar 4,83% dan tahun 2016 sebesar 5,04%. Pada tahun 2017-2020 menunjukkan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi aceh, yaitu pada tahun 2017 sebesar 15,92%, tahun 2018 sebesar 15,68%, tahun 2019 sebesar 15,01% dan tahun 2020 sebesar 15,43%. Sementara untuk Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, masih tetap Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,3%, tahun 2018 sebesar 4,77%, tahun 2019 sebesar 4,5% dan tahun 2020 sebesar 4,89%.

Tabel 2. Persentase penduduk miskin per Provinsi di Sumatera tahun 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	19.48	18.58	17.72	16.98	17.11	16.43	15.92	15.68	15.01	15.43
Sumatera Utara	10.83	10.41	10.39	9.85	10.79	10.27	9.28	8.94	8.63	9.14
Sumatera Barat	8.99	8	7.56	6.89	6.71	7.14	6.75	6.55	6.29	6.56
Riau	8.17	8.05	8.42	7.99	8.82	7.67	7.41	7.21	6.9	7.04
Jambi	7.9	8.28	8.42	8.39	9.12	8.37	7.9	7.85	7.51	7.97
Sumatera Selatan	13.95	13.48	14.06	13.62	13.77	13.39	13.1	12.82	12.56	12.98
Bengkulu	17.36	17.51	17.75	17.09	17.16	17.03	15.59	15.41	14.91	15.3
Lampung	16.58	15.65	14.39	14.21	13.53	13.86	13.04	13.01	12.3	12.76
Kep.Bangka Belitung	5.16	5.37	5.25	4.97	4.83	5.04	5.3	4.77	4.5	4.89
Kep. Riau	6.79	6.83	6.35	6.4	5.78	5.84	6.13	5.83	5.8	6.13

Sumber : BPS, 2022.

Berdasarkan table 5.3, diketahui bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Provinsi Aceh yaitu ditahun 2011 sebesar 19,48% dan ditahun 2012 sebesar 18,58%. Sedangkan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ditahun 2011 sebesar 5,16% dan tahun 2012 sebesar 5,16%.

Pada periode tahun 2013-2016, tingkat kemiskinan tertinggi diwilayah Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu ditahun 2013 sebesar 17,75%, tahun 2014 sebesar 17,09%, tahun 2015 sebesar 17,16% dan tahun 2016 sebesar 17,03%. Sementara Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ditahun 2013 sebesar 5,25%, tahun 2014 sebesar 4,97%, tahun 2015 sebesar 4,83% dan tahun 2016 sebesar 5,04%. Sedangkan periode tahun 2017-2020, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2017 sebesar 15,92%, tahun 2018 sebesar 15,68%, tahun 2019 sebesar 15,01%, dan tahun 2020 sebesar 15,43%.

Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 19,48% dan terendah terjadi ditahun 2019 yaitu sebesar 15,01%. Tingkat kemiskinan tertinggi Provinsi Sumatra Utara ditahun 2011 sebesar 10,83% dan ditahun 2019 sebesar 8,63%. Di Provinsi Sumatra Barat tingkat kemiskinan tertinggi terjadi ditahun 2011 yakni sebesar 8,99% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 6,29%.

Adapun di Provinsi Riau tingkat kemiskinan tertinggi ditahun 2015 sebesar 8,82% dan terendah ada ditahun 2019 sebesar 6,9%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi ditahun 2015 sebesar 9,12% dan terendah ditahun 2019 sebesar 7,51%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan ditahun 2013 sebesar 14,06 % dan terendah ditahun 2019 sebesar 12,56%.

Provinsi Bengkulu merupakan satu diantara Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Karena ditahun 2013, tingkat kemiskinan tertingginya yaitu sebesar 19,75% dan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Aceh ditahun 2019 yaitu sebesar 14,91%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada ditahun 2011 sebesar 16,58 % dan tingkat kemiskinan terendah ditahun 2019 sebesar 12,3%. Tingkat kemiskinan

tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun 2012 sebesar 5,37%. Kemudian tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepualuan Riau ditahun 2012 sebesar 6,83% dan tingkat kemiskinan terendah ditahun 2019 sebesar 5,8%.

Tingkat investasi di Sumatera dilihat dari rasio penanaman modal tetap Bruto masing-masing Provinsi. Tabel 5.5 menunjukkan data investasi di Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Provinsi dengan tingkat investasi tertinggi tiap tahunnya yakni Provinsi Bengkulu sebesar 44,229% dan tingkat investasi terendah di Sumatera adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 21,261%.

Tabel 3. Tingkat Investasi tahun 2011-2020 per Provinsi di Sumatera

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	31.45	32.05	31.08	32.22	33.63	34.89	32.52	32.15	32.95	34.31
Sumatera Utara	29.87	30.46	30.21	29.59	29.24	29.15	29.13	29.41	30.26	30.23
Sumatera Barat	30.53	30.56	30.14	29.91	29.57	29.85	29.61	29.15	29.19	28.88
Riau	26.99	28.42	29.19	28.94	30.03	30.45	30.09	30.50	30.44	30.22
Jambi	22.07	24.78	25.29	23.43	22.26	22.25	22.07	21.54	21.39	21.71
Sumatera Selatan	39.01	38.66	38.45	38.39	36.86	37.96	38.10	37.29	35.88	36.37
Bengkulu	41.58	42.25	43.17	44.23	43.54	43.43	43.88	44.15	44.17	43.45
Lampung	30.58	31.41	30.83	31.00	31.09	32.31	33.03	34.09	33.88	32.76
Kep.Bangka Belitung	21.43	21.32	21.26	21.30	21.37	21.84	22.23	22.56	23.09	22.08
Kep. Riau	40.70	40.67	40.44	40.14	39.09	38.43	38.24	39.92	40.38	39.89

Sumber : BPS, 2022.

Berdasarkan pada table 5.5. diketahui nilai tingkat investasi tertinggi di Provinsi aceh ditahun 2020 sebesar 34,309% dan ditahun 2013 merupakan nilai tingkat investasi terendah di Provinsi Aceh dengan besaran 31,082%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Sumatra utara ditahun 2012 sebesar 30,459% dan ditahun 2017 merupakan tingkat investasi terendah dengan nilai 29,129%.

Provinsi yang mengalami penurunan tingkat investasi pada kurun wakru 2011 -2020 yakni provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Sumatra barat ditahun 2012 sebesar 30,559% dan tingkat investasi terendah ditahun 2020 sebesar 28,875%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Jambi ditahun 2013 sebesar 25,291% dan tingkat investasi terendah ditahun 2018 sebesar 21,538%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau ditahun 2011 sebesar 40,704% dan tingkat investasi terendah ditahun 2017 sebesar 38,240%. Adapun Provinsi lainnya mempunyai trend peningkatan investasi.

Di Provinsi Riau tingkat investasi tertinggi terjadi ditahun 2018 sebesar 30,504% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2011 sebesar 26,991%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan ditahun 2011 sebesar 39,007% dan tingkat investasi terendah ditahun 2017 sebesar 35,879%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Bengkulu terjadi ditahun 2019 sebesar 44.172% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2011 sebesar 41,579%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Lampung ditahun 2018 sebesar 34,090% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2011 sebesar 30,578%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun 2019 sebesar 23,087% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2013 sebesar 21,261%.

Belanja modal di Sumatera tahun 2011 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 5,65 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,23 trilyun. Pada tahun 2012, Provinsi Riau merupakan wilayah yang

belanja modalnya tertinggi yaitu sebesar 7,00 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,27 trilyun. Pada tahun 2014 belanja modal di Sumatera menunjukan bahwa Provinsi Sumatra selatan memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 8,34 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,49 trilyun.

Tabel 4. Belanja modal per Provinsi di Sumatera tahun 2011-2020 (Trilyun)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	3.78	2.80	4.37	7.37	8.55	9.87	8.92	6.32	8.74	6.40
Sumatera Utara	5.65	6.50	7.72	8.07	8.75	9.79	10.89	9.63	9.60	7.12
Sumatera Barat	2.21	2.77	3.18	3.68	4.21	5.19	5.13	4.95	5.23	3.52
Riau	5.33	7.00	8.80	7.42	8.55	6.29	6.13	4.60	6.20	4.46
Jambi	2.41	3.05	4.13	4.01	3.53	3.73	3.91	3.68	4.51	3.25
Sumatera Selatan	5.21	6.11	7.90	8.34	6.94	6.73	7.64	7.87	10.35	8.71
Bengkulu	1.23	1.27	1.51	1.83	2.36	2.61	2.45	2.03	2.47	1.90
Lampung	2.67	3.48	3.85	3.99	4.47	5.66	6.47	6.17	4.53	3.51
Kep.Bangka Belitung	1.25	1.45	1.61	1.49	1.75	1.93	1.61	1.60	1.82	1.38
Kep. Riau	1.32	1.60	2.17	2.54	1.66	1.96	2.11	2.27	2.78	1.84

Sumber : BPS 2022.

Pada tahun 2015 Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 8,75 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Riau yaitu sebesar 1,66 trilyun. Pada tahun 2016 Provinsi aceh memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 9,87 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,93 trilyun. Pada tahun 2017 Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 10,89 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,61 trilyun.

Pada tahun 2018 Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 9,63 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,60 trilyun. Pada tahun 2019 Provinsi Sumatra selatan memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 10,35 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,82 trilyun. Pada tahun 2020 Provinsi Sumatra selatan memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 8,71 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,38 trilyun.

Berdasarkan data Provinsi aceh mengalami turun naik belanja modal. Belanja modal tertinggi pada tahun 2016 sebesar 9,87 trilyun. Sedangkan belanja modal terendah pada tahun 2012 sebesar 2,80 trilyun. Provinsi Sumatra utara mengalami kenaikan belanja modal, belanja modal tertinggi pada tahun 2017 sebesar 10,89% trilyun sedangkan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 5,65% trilyun. Provinsi Sumatra barat mengalami kenaikan belanja modal. Belanja modal tertinggi ditahun 2016 sebesar 5,16 trilyun dan belanja modal terendah ditahun 2011 sebesar 2,11 trilyun. Provinsi Riau mengalami naik turun dalam belanja modal, Belanja modal tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,80 trilun dan belanja modal terendah pada tahun 2020 sebesar 4,46 trilyun. Provinsi Jambi mengalami kenaikan dalam belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4,51 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2,41 trilyun. Provinsi Sumatra Selatan mengalami kenaikan dalam

belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2019 sebesar 10,35 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 5,21 trilyun.

Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dalam belanja modal, belanja modal tertinggi pada tahun 2016 sebesar 2,61 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 1,23 triliun. Provinsi lampung mengalami kenaikan dalam belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2017 sebesar 6,47 triliun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 2,47 trilyun. Belanja modal tertinggi Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 1,82 triliun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 1,25 triliun. Pada tahun 2019, belanja modal tertinggi di Provinsi Riau yakni sebesar 2,78 trilyun dan belanja modal terendah sebesar 1,32 triliun.

Untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran serta investasi terhadap kemiskinan secara langsung dipergunakan analisis regresi berganda data panel pada rentang waktu tahun 2011 -2010 dan pada 10 Provinsi di Sumatera.

Pada analisis regresi data panel maka dilaksanakan sejumlah tahapan pemilihan model terbaik yakni Uji *Chow* untuk menentukan antara model OLS dengan *Fixed Effect Mode*l, uji *Hausman* untuk memilih antara *fixed effect* model dengan *random effect* model. Berdasarkan hasil uji, maka model yang dipergunakan dalam persamaan ini adalah *random effect*. Dengan bantuan *software* Eviews-9, maka hasil dari penggarapan data adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. Hasil analisis regresi variabel bebas terhadap Kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	0.063	0.034	1.862535	0.06*
Pendidikan (X_2)	-0.084	0.014	-5.84436	0.00***
Pengangguran (X_3)	0.363	0.066	5.510929	0.00***
Investasi (X_4)	-0.097	0.059	-1.66236	0.09*
R-squared	0.55			
Prob(F-statistic)	0.00			

Sumber : Pengolahan data 2022

Ket : * sig α=10%. ** sig α=5% dan *** sig α=1%

Tabel 5.9 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 10%, dimana nilai signifikansi sebesar 0.06 <0,10. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0.063 yang bermakna setiap terjadi peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,063% dengan asumsi variabel lain cateris paribus.

Adapun variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -0,084 yang bermakna bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen angka partisipasi murni sekolah SMA sederajat maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 0,084 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1% dimana nilai signifikansi sebesar 0.00 <0,01.

Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1% dimana tingkat signifikansi sebesar 0.00 <0,01. Nilai koefisien pengangguran sebesar 0.363 berarti setiap terjadi peningkatan 1 persen tingkat pengangguran terbuka maka nilai kemiskinan akan meningkat sebesar 0,363 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus.

Selanjutya variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada derajat kepercayaan 10% dimana nilai signifikansi sebesar 0.09 <0,10. Tingkat koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0.097 berarti setiap terjadi peningkatan 1 persen rasio penanaman modal tetap bruto maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 0,097 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus.

Adapun nilai R Sguare sebesar 0,55 yang memiliki makna bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran serta investasi mampu mengartikan variabel tingkat kemiskinan sebesar 55%. Sementara nilai e1 diperoleh sebesar 0.67. adapun perhitungan nilai e1 adalah sebagai berikut :

$$e1 = \sqrt{1 - R^2}\ , e1 = \sqrt{1 - 0{,}55} = 0{,}67$$

Persamaan model 1 adalah sebagai berikut :

Kemiskinan = 0,063Pertumbuhan ekonomi – 0,084Pendidikan + 0,363Pengangguran – 0,097Investasi

4.2 Pembahasan

Ketimpangan wilayah atau ketimpangan wilayah dan kemiskinan merupakan persoalan yang masih terus dihadapi oleh hamper semua Negara berkembang. Terdapat beberapa variabel yang menjadi penyebab kesenjangan wilayah. Variabel-variabel penentu ketimpangan ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Untuk variabel yang secara tidak langsung, mempengaruhi ketimpangan wilayah maka dilakukan pengujian pengaruh melalui variabel antara. Dalam penelitian ini kemiskinan merupakan variabel intervening/jalur dari ketimpangan wilayah.

Pada pengolahan data model pertama, kemiskinan merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran dan investasi. Dari hasil penggarapan data didapatkan hasil bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka nilai kemiskinan di Sumatera akan meningkat. Hasil ini berbeda dengan temuan (Didu and Fauzi 2016) dan (Purnama 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak dan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun (Pangiuk 2018) dan (Susanto and Pangesti 2021) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi dan di Indonesia.

Berlandaskan hasil penelitian didapati bahwa pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di sumatera sebesar 6,3%. Hasil koefesien yang bernilai positif menunjukkan bahwa adanya pertambahan pertumbuhan ekonomi maka nilai kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini diduga oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak dinikmati oleh kelompok miskin sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera.

Variabel pendidikan berdampak secara langsung sebesar -9,7% terhadap kemiskinan di Sumatera. Hasil penelitian memperlihatkan hubungan negatif sugnifikan yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan persentase partisipasi murni sekolah menengah sederajat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera sebesar 9,7 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pekerka yang memiliki pendidikan minimal SMA maka kemungkinan untuk memperoleh atau melakukan pekerjaan baik sektor formal maupun informal akan meningkat yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian (Ainunnisa and Hidayat 2019) juga menemukan hubungan negatif antara pendidikan dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sebaliknya, (Mahsunah 2013) menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur, hal ini diakibatkan oleh semakin tingginya persaingan di pasar tenaga kerja dan kebutuhan industrialisasi akan tenaga yang berkualitas dan berpengalaman.

Adapun hubungan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan di Sumatera bernilai positif, hal ini menunjukkan setiap ada kenaikan tingkat pengangguran

terbuka maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan dan akan menyebabkan kemiskinan karena pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidup tidak ada. Sebaliknya (Amalia 2012) menemukan bahwa di kawasan timur indonesia tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Investasi yang dihitung melalui rasio penanaman modal tetap bruto memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera. Hal ini bermakna bahwa setiap terjadi peningkatan satu persen rasio penanaman modal tetap bruto maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 9,7%. Peningkatan investasi akan memicu terciptanya lapangan kerja yang akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Hasil ini seiring dengan pernyataan (Jhingan, 2006) bahwa dengan investasi akan menciptakan pembelian faktor input produksi, seperti mesin-mesin pabrik, perbaikan infrastruktur dan lainnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Agung Istri Diah Paramita and Bagus Putu Purbadharmaja 2015) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara investasi dengan kemiskinan di Provinsi Bali. Kendati demikian hasil temuan (Safitri and Effendi 2019) menemukan hubungan positif tidak signifikan antara investasi dengan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

5. Conclusions and Recommendations

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :
Variabel pertumbuhan ekonomi, pendikan, pengangguran dan investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di sumatera, dengan nilai R^2 sebesar 55%.
Adapaun saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah : Setiap Provinsi agar melakukan kegiatan ekonomi yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskina dan ketimpangan wilayah di Sumatera.

Acknowledgments

Dalam penulisan penenlitian dan atikel ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Kami usapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan bantuan pendanaan pada penelitian ini.

.

References

Acemoglu, Daron. 2012. "Introduction to Economic Growth." *Journal of Economic Theory* 147(2):545–50.

Agung Istri Diah Paramita, Anak and Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2015. "Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali." *E-Jurnal EP Unud* 4(10):1194–1218.

Ainunnisa, Vera and Wahyu Hidayat. 2019. "Pengaruh Tingkat Pengangguran, Investasi, Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten." *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 3(1):140–52.

Ali, Asghar and Sajjad Ali. 2018. "Determinants of Poverty in Pakistan." *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences Researchstan Journal of Humanities and Social Sciences Research*

01(02):17–31.

Amalia, Fitri. 2012. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010." *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 10(2):158–69.

Asadullah, M. Niaz and Antonio Savoia. 2018. "Poverty Reduction during 1990–2013: Did Millennium Development Goals Adoption and State Capacity Matter?" *World Development* 105:70–82.

Bishaw, Alemayehu; Glassman, Brian. 2016. "Poverty : 2014 and 2015." *American Community Survey Briefs* 15(September):1–14.

Breunig, Robert and Omer Majeed. 2020. "Inequality, Poverty and Economic Growth." *International Economics* 161:83–99.

Didu, Saharuddin and Ferri Fauzi. 2016. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6(1):102–17.

Faisala, Faisal, Ahmad Risal, Hardianto Hardiato, and Elihami Elihami. 2020. "Nonformal Education and Reduction of Poverty in Rural Areas." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1(1).

Febriani, Ratu Eva and Yusnida Yusnida. 2020. "Kajian Kesejahteraan Di Provinsi Bengkulu: Sebuah Temuan Dari Analisis Jalur." *Convergence: The Journal of Economic Development* 2(1):16–35.

Freistein, Katja and Bettina Mahlert. 2016. "The Potential for Tackling Inequality in the Sustainable Development Goals." *Third World Quarterly* 37(12):2139–55.

Hofmarcher, Thomas. 2021. "The Effect of Education on Poverty: A European Perspective." *Economics of Education Review* 83(June 2020):102124.

Kaldor, Nicholas. 2019. "A Model of Economic Growth." *JSTOR* 67(268):5–7.

Kogid, Mori, Dullah Mulok, Lim Fui Yee Beatrice, and Kasim Mansur. 2010. "Determinant Factors of Economic Growth in Malaysia: Multivariate Cointegration and Causality Analysis." *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* (24):123–37.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomi Pembangunan : Masalah, Kebijakan Dan Politik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Lamba, Arung, Paulus K. Allo, and Ramasoyan Arung Lamba. 2019. "Effect of Fiscal Decentralization Policy of Regional Economic Imbalances towards Economy Growth in Eastern Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3(2):112–27.

Leal Filho, Walter, Violeta Orlovic Lovren, Markus Will, Amanda Lange Salvia, and Fernanda Frankenberger. 2021. "Poverty: A Central Barrier to the Implementation of the UN Sustainable Development Goals." *Environmental Science and Policy* 125(August):96–104.

Mahsunah, Durrotul. 2013. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1(3):1–17.

Michael P Todaro ;Stephen C Smith. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid I*. edited by H. Munandar. Jakarta: Erlangga.

Musahadi, MN Ichwan, Mutiullah, Alim Roswantoro, M. Sardi, Ishak Hariyanto, M. Arif, MM Iqbal, Benny Afwadzi, Muhammad Barir, and MZ Qadafy. 2015. "Agama, Filsafat, & Kemiskinan."

Nazir, M. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia.

Pangiuk, Ambok. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2(2):44.

Pratama, Nengah Rai Narka Suda and Made Suyana Utama. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8 [7](2337–3067):651–80.

Purnama, Nadia Ika. 2017. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomikawan* 62–70.

Putro, Pilipus Bambang Wahyono, Sri Mintarti, and Adi Wijaya. 2018. "Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan." *Inovasi* 13(2):135.

Roy, J., P. Tschakert, H. Waisman, S. Abdul Halim, P. Antwi-Agyei, P. Dasgupta, B. Hayward, M. Kanninen, D. Liverman, C. Okereke, PF Pinho, K. Riahi, and Ag Suarez. 2018. "Sustainable Development, Poverty Eradication and Reducing Inequalities." *Global Warming of 1.5 °C. an IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Chang* 445–538.

Safitri, Leli and Muhammad Effendi. 2019. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Pendudk Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2(2):1–13.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Susanto, Rudy and Indah Pangesti. 2021. "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7(2):271.